

EVALUASI PROGRAM *NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER AND PROJECT PHASE 2* DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras)

(Skripsi)

Oleh

Anggi Lestari



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2019

ABSTRACT

EVALUATION OF NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER AND PROJECT PHASE 2 PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG (STUDY IN KANGKUNG, BUMI WARAS)

BY

ANGGI LESTARI

The developmental of a country is determined by the ability to accomplish the nationwide building. Nation development causes the population growth, so it gives the impact to the urban life. the density of the population creates slums, like in Kangkung. Therefore, the government provides the Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 Programs to overcome slums.

This study used the descriptive qualitative method. The technique of collecting data through the interview, observation, and documentation. This study used the theory of sequential evaluation criteria by Dunn (2003), which was effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness and accuracy.

The results of this study indicate that the evaluation of the phase 2 neighborhood upgrading shelter and project program in Kangkung has been implemented well. The result of improvements that have been made, such as roads, drainage, deucker plates, and waste handling. But the people is still reluctant to maintain and utilize improved facilities.

Key words : Evaluation, Slums, NUSP-Phase 2

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM NEIGHBORHOOD UPGRADING SHELTER AND PROJECT PHASE 2 DI KOTA BANDAR LAMPUNG (STUDI PADA KELURAHAN KANGKUNG KECAMATAN BUMI WARAS)

OLEH
ANGGI LESTARI

Perkembangan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Berkembangnya suatu pembangunan menyebabkan terjadinya tumbuh laju penduduk yang meningkat, sehingga berdampak pada kehidupan wilayah perkotaan yang semakin padat. Wilayah perkotaan yang padat tersebut, menimbulkan dampak seperti permukiman-permukiman kumuh, seperti halnya di Kelurahan Kangkung. Oleh karena itu pemerintah hadir dengan memberikan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* untuk mengatasi permukiman kumuh.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori kriteria evaluasi menurut Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* di kelurahan kangkung telah di jalankan dengan baik. Dilihat dari hasil perbaikan yang telah dilakukan, seperti jalan, drainase, *plat deucker*, maupun penanganan sampah. Tetapi dalam pemeliharaan prasarana tersebut masyarakat masih bersikap enggan untuk memelihara dan memanfaatkan fasilitas yang telah diperbaiki.

Kata Kunci: Evaluasi, Kumuh, NUSP-Phase 2.

**EVALUASI PROGRAM NEIGHBOHOOD UPGRADING SHELTER AND
PROJECT PHASE 2 DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Pada
Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras)**

Oleh

ANGGI LESTARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2019**

Judul Skripsi

**: EVALUASI PROGRAM *NEIGHBOHOOD*
UPGRADING SHELTER AND PROJECT
PHASE 2 DI KOTA BANDAR LAMPUNG
(Studi Pada Kelurahan Kangkung
Kecamatan Bumi Waras)**

Nama Mahasiswa

: Anggi Lestari

Nomor Pokok mahasiswa : 1416041009

Jurusan

: Ilmu Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu sosial dan Ilmu Politik



1. Komisi Pembimbing

Dra. Dian Kagungan, M.H.

NIP 19690815 199703 2 001

Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.

NIP 19780923 200312 1 001

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

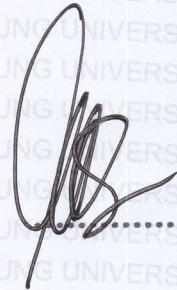
Dr. Noverman Duadji, M.Si.

NIP 19691103 200112 1 002

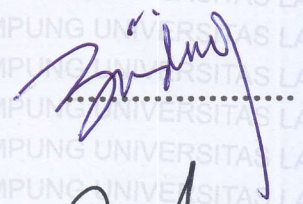
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

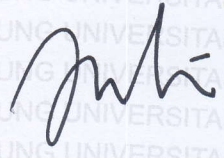
Ketua : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



Sekretaris : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Penguji Utama : **Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya

NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Juli 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandarlampung, 23 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Anggi Lestari

NPM. 1416041009

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama lengkap Anggi Lestari, lahir di Bandar Lampung tanggal 09 Juli 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Ahyani, S.I.Kom dan Ibu Neli Asmarani. Peneliti memulai pendidikan formal pertama di Taman Kanak-Kanak Unila Bandar Lampung pada tahun 2000-2002, selanjutnya Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2002-2008. Kemudian menempuh pendidikan ke jenjang selanjutnya yaitu Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung pada tahun 2008-2011, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung pada tahun 2011-2014. Pada tahun 2014 Peneliti memulai pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Lampung jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Selama menempuh perkuliahan, Peneliti tergabung dalam organisasi kemahasiswaan yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Kemudian Peneliti juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata (Periode I) selama 40 hari

pada Januari 2017 di Desa Bina Karya Mandiri, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah.

Motto

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan maka itu awal kegagalan baginya”

(Nabi Muhammad SAW)

“Kebahagiaan itu adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan tanpa berkurangnya semangat hidup dalam menggapai mimpi”

(Muhammad Sofyan)

“Capailah impianmu dengan perjuangan yang maksimal, dan besarkan kemauanmu disana pasti ada jalan”

(Anggi Lestari)

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syiukur
Alhamdulillahilahi robbi' alamin kepada Allah SWT
Aku persembahkan karya ini kepada:
Kedua Orangtuaku Tersayang,
Ayah Ahyani dan Mama Neli
Sebagai segalanya dalam hidupku. Dan Panutan ku.*

*Nenek dan Kakek Tersayang
Nenek Amanah dan Nenek Yunani
Kakek Sudirman
Sebagai idola dalam hidupku*

*Kakakku dan adik-adikku tersayang,
Abang Muhammad Sofyan
Adik Nabila Putri Nelya
Sebagai penyemangat dalam hidupku.*

*Keluarga besarku, sahabat-sahabat dan teman-teman,
Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati*

*Almamater Tercinta,
Universitas Lampung*

SANWACANA

Alhamdulillahilahi robbil'alamina segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Evaluasi Program Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 di Kota Bandar Lampung (Studi Pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras)**" ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan berupa arahan, bimbingan, semangat, kritik, saran dan masukan dari berbagai pihak yang turut membantu selama proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti ini mengucapkan terima kasih dan rasa syukur kepada:

1. Allah SWT atas ketenangan hati, kejernihan pikiran, rahmat, hidayah dan karunia disetiap waktu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

3. Bapak Dr. Noverman Duadji, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, terima kasih atas arahan, motivasi dan dukungannya selama ini.
4. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H selaku dosen pembimbing pertama, terima kasih atas bimbingan, dukungan, bantuan, nasihat dan motivasi yang ibu berikan selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga peneliti termotivasi dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Peneliti memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang sekiranya kurang berkenan. Semoga segala ilmu, keikhlasan dan ketulusan ibu dalam membimbing saya mendapat keberkahan dari Allah SWT.
5. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingan, dukungan dan nasihat yang bapak berikan sehingga peneliti selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Peneliti memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang sekiranya kurang berkenan. Semoga segala ilmu, keikhlasan dan ketulusan bapak dalam membimbing saya mendapat keberkahan dari Allah SWT.
6. Ibu Intan Fitri Meutia, S.A.N., MA., Ph.D selaku dosen pembahas, terima kasih atas arahan, saran dan masukan yang telah ibu berikan selama proses pengerjaan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu, keikhlasan dan ketulusan ibu dalam membimbing saya mendapat keberkahan dari Allah SWT.
7. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S. selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih telah banyak memberikan dukungan dan motivasi selama peneliti menjalani proses perkuliahan.

8. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si, Ibu Selvi Diana Melinda, S.AN., M.PA, Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si., Bapak Syamsul Maarif, S.IP., M.Si., Bapak Dr. Deddy Hermawan, S.Sos, M.Si., Bapak Nana Mulayana, S.IP., M.Si., Bapak Izul Fatchu Reza, S.AN., M.A., Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si, Ibu Meliyana, S.IP., M.A., Ibu Devi Yulianti, S.AN., M.A., Ibu Ita prihantika, S.Sos., M.A., dan Ibu Anisa Utami, S.IP., M.A. selaku dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, terima kasih atas ilmu, motivasi dan dukungan yang peneliti terima selama menjalani proses perkuliahan. Semoga ilmu dan pengalaman yang telah penulis peroleh selama perkuliahan dapat menjadi bekal untuk penulis kedepannya.
9. Ibu Wulan dan Bapak Johari selaku staf jurusan Administrasi Negara, terima kasih banyak telah membantu kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas Lampung, terima kasih telah mendukung dan membantu peneliti selama masa perkuliahan di Universitas Lampung.
11. Segenap informasi penelitian yaitu Bapak Drs. Tajri selaku Ketua LKM di Kelurahan Kangkung, Bapak Drs. Ediyalis selaku Lurah di Kelurahan Kangkung, Bapak Jhoni Asman, ST selaku PPK Program NUSP *Phase 2* serta bapak Edi, bapak Ahmad dan Ibu Novi selaku warga di Kelurahan Kangkung. Terima kasih telah memberikan informasi dan waktu bagi peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Keluargaku tercinta, terima kasih atas doa, kasih sayang, semangat, perhatian dan dukungan dalam segala situasi dengan ikhlas terutama saat penyusunan skripsi ini. Mungkin kata sayang jarang terucap tapi semoga perasaan kasih sayang dan terima kasih dapat tergambarkan dan terasa dari keseharian peneliti. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kebahagiaanNya kepada kalian.
13. Abangku Muhammad Sofyan, adik ku Nabila Putri Nelya, terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang canda tawa, dan semangat di setiap waktu. Semoga Allah SWT selalu mengiringi dan melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kesuksesan kepada kalian.
14. Sahabatku Luvita Lestari, Neli Agustin, Endah Budi, Maya Fransiska terima kasih setiap dukungannya. Semoga setiap langkah dan hembusan napas kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.
15. Sahabatku Andra Diah Ayu Ningtyas, Nadya Audyna Suprpto, Dian Suci Pratiwi, Heni Nur Efendi, Maya Marsitadan Oci Anggraini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian kalian sejak memulai perkuliahan hingga saat ini. Keseharian bersama kalian selama melewati masa perkuliahan terutama penyusunan skripsi ini, semoga selalu menjadi kebahagiaan dikala kita jauh. Peneliti berharap kita selalu bersama dan saling mendukung meraih kesuksesan kedepannya. Terimakasih telah menemani dikala susah dan senang dan kedepannya terus seperti ini hingga tua nanti. Semoga setiap langkah dan hembusan napas kalian selalu diberkahi

oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.

16. Teman-teman seangkatan Ilmu Administrasi Negara 2014 “Gelas Antik”.

Terima kasih atas dukungan dan motivasi serta telah menjadi bagian dari kisah perkuliahan peneliti. Semoga setiap langkah dan hembusan napas kalian selalu diberkahi oleh Allah SWT dan semoga setiap kebaikan dan keikhlasan kalian menjadi pahala yang berlimpah.

17. Peneliti berterima kasih kepada yulia ananda (yang katanya calon kakak

ipar) atas dukungan dan support yang selama diberikan untuk peneliti.

Terimakasih telah mendengarkan curahan hati peneliti selama penyusunan skripsi ini, semoga tetap menjadi orang yang ada dikala peneliti butuh untuk tempat mencurahkan hati

18. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga bantuan dan kebaikan yang diberikan kepada peneliti mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, peneliti memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, karena peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi peneliti berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bandarlampung, 23 Juli 2019

Peneliti

Anggi Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kebijakan Publik	12
1. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	14
2. Jenis Kebijakan Publik	16
3. Proses Kebijakan Publik	17
C. Evaluasi Kebijakan Publik	19
1. Evaluasi	19
2. Evaluasi Kebijakan	21
3. Tujuan Evaluasi Kebijakan	22
4. Pentingnya Evaluasi Kebijakan	23
5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	25
6. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan	27
7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan	28
8. Kriteria Evaluasi Kebijakan	29
9. Masalah dalam Evaluasi Kebijakan	36
10. Tahap-Tahap Evaluasi Kebijakan	39
D. Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2</i> (NUSP-Phase 2)	40
1. Tujuan Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter and Project</i> <i>Phase 2</i>	41

2. Sasaran Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2</i>	43
E. Pemukiman Kumuh	45
1. Pengertian Pemukiman	45
2. Pengertian Pemukiman Kumuh	46
3. Ciri-Ciri Pemukiman Kumuh	47
F. Kerangka Pikir	48
III. METODE PENELITIAN	51
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	51
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
1. Data Primer	54
2. Data Sekunder	54
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Wawancara	54
2. Observasi	56
3. Dokumentasi	56
F. Instrument Penelitian	56
G. Teknis Analisis Data	57
1. Pengumpulan Data	58
2. Reduksi Data	58
3. Penyajian Data	59
4. Kesimpulan	59
H. Teknik Keabsahan Data	59
1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (<i>Credibility</i>)	60
2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (<i>Transferability</i>).....	60
3. Teknik memeriksa Ketergantungan (<i>Dependability</i>)	61
4. Kepastian (<i>confirmability</i>)	61
IV. Hasil dan Pembahasan	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
1. Kelurahan Kangkung	62
a. Visi dan Misi Kelurahan Kangkung	63
b. Keadaan Penduduk	63
c. Sarana dan Prasarana	65
d. Struktur Organisasi Pemerintahan	66
B. Hasil Penelitian	68
1. Evaluasi Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2</i> di Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung	68
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengendalian Efektivitas Program NUSP <i>Phase 2</i>	74

2. Efisiensi Program NUSP <i>Phase 2</i> Terhadap Sumber Daya Manusia Yang Terlibat	80
3. Kecukupan Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Program NUSP <i>Phase 2</i>	84
4. Perataan Dalam Kesesuaian Tujuan Yang di Tetapkan Program NUSP <i>Phase 2</i>	90
5. Responsivitas Masyarakat Terhadap Program NUSP <i>Phase 2</i>	92
6. Ketepatan Terhadap Dampak Yang di Timbulkan Program NUSP <i>Phase 2</i>	94
C. Pembahasan	96
1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengendalian Efektivitas Program NUSP <i>Phase 2</i>	96
2. Efisiensi Program NUSP <i>Phase 2</i> Terhadap Sumber Daya Manusia Yang Terlibat	98
3. Kecukupan Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur Lingkungan Program NUSP <i>Phase 2</i>	100
4. Perataan Dalam Kesesuaian Tujuan Yang di Tetapkan Program NUSP <i>Phase 2</i>	102
5. Responsivitas Masyarakat Terhadap Program NUSP <i>Phase 2</i>	103
6. Ketepatan Terhadap Dampak Yang di Timbulkan Program NUSP <i>Phase 2</i>	104
V. Kesimpulan dan Saran	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program NUSP Phase 2 Kota Bandarlampung Tahun (2015-2017)	5
2. Penelitian Terdahulu	10
3. Kriteria Evaluasi	30
4. Daftar Informan	55
5. Dokumen Terkait Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2</i>	56
6. Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Menurut Jenis Kelamin	63
7. Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Menurut Pendidikan	64
8. Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Menurut Mata Pencarian	64
9. Jumlah Penduduk Kelurahan Kangkung Menurut Agama	65
10. Sarana dan Prasarana di Kelurahan Kangkung	65
11. Data Luasan Kumuh Per/RT Kelurahan Kangkung	79

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Kerangka Pikir	50
2. Struktur Organisasi Kelurahan Kangkung	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman	58
2. Jalan Sekitaran Rumah Warga Kelurahan Kangkung Yang Telah di Perbaiki Dengan Paping.	72
3. Tumpukan Sampah di Depan Rumah Warga	73
4. Kerusakan Jalan di Kelurahan Kangkung	74
5. Pengerjaan Plat Deucker	76
6. Pengerjaan Drainase	77
7. Pengerjaan Paving Block	77
8. Musyawarah Kelurahan	84
9. Hasil Perbaikan Jalan di Kelurahan Kangkung	86
10. Perbaikan Drainase di Kelurahan Kangkung	87
11. Perbaikan Jalan Dengan Rabat Beton	88
12. Sampah Yang dibuang Sembarangan Oleh Masyarakat	89

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan sendiri hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun sarana dan aspek penunjang dalam kehidupan, oleh sebab itu pembangunan merupakan hal yang diperlukan bagi suatu negara. Keberhasilan suatu pembangunan tidak hanya dilihat melalui aspek ekonomi, tetapi pembangunan juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti; sosial, budaya maupun politik.

Pembangunan yang baik, dapat dikatakan bahwa pembangunan tersebut mencakup pembangunan secara fisik maupun non-fisik. Pembangunan fisik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh negara maupun pemerintah yang bertujuan membuat perubahan kearah yang lebih baik yang dapat dilihat langsung perubahannya, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, tempat ibadah dan sarana umum lainnya. Pembangunan fisik ini dilakukan guna memberikan masyarakat infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat dapat menggunakannya dalam aktivitas sehari-hari. Berbeda dengan pembangunan fisik, pembangunan non-fisik

ini lebih terhadap pembangunan pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya yang memerlukan sarana dan prasarana.

Berkembangnya suatu pembangunan menyebabkan terjadinya tumbuh laju penduduk yang meningkat, sehingga berdampak pada kehidupan wilayah perkotaan yang semakin padat. Wilayah perkotaan yang padat tersebut, menimbulkan dampak seperti permukiman-permukiman kumuh. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa “Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”.

Permukiman kumuh sering sekali dihadapi oleh kota-kota di Indonesia. Banyak sekali kota-kota di Indonesia yang menjadi permukiman kumuh. Permasalahan permukiman kumuh salah satunya dapat di picu dengan adanya kepadatan bangunan yang tinggi. Berdasarkan PERMEN Kementrian PUPR No.2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan kumuh memiliki kriteria diantaranya: 1. Bangunan gedung, 2. Jalan lingkungan, 3. Penyediaan air minum, 4. Drainase lingkungan, 5. Pengelolaan air limbah, 6. Pengelolaan persampahan, dan 7. Proteksi kebakaran.

Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menggunakan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) dan program ini telah dilaksanakan pada tahun 2015, dan dengan adanya program tersebut permasalahan permukiman kumuh lebih cepat ditangani. Program *Neighborhood*

Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP-P2) ini merupakan program Kementrian Umum dan Pekerjaan Rumah (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, program ini juga merupakan program perbaikan kawasan kumuh di perkotaan. Beberapa kawasan yang harus diperbaiki dalam program ini mulai dari drainase, jembatan, sanitasi, dan lainnya. Dana yang dipergunakan dalam program ini merupakan pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB) didasari melalui perjanjian No. 3122-INO dan di tandatangani pada 23 April 2014. (Ardian, Bagus. 2017. <https://www.slideshare.net/bogesi/paparan-kick-off-review-mission-ta-2017> diakses pada 2 desember 2018 Pukul 11:36)

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat yang berdaya dan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak, dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta penguatan kapasitas kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat miskin.

Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) tersebut dilaksanakan melalui pendekatan pemberdayaan. Pada program ini masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan, hal ini dikarenakan masyarakat dituntut untuk turun dan ikut melaksanakan program tersebut. Masyarakat sangat berperan dalam program ini, mulai dari perencanaan hingga dengan pengimplementasian. Ikut sertanya masyarakat dalam Program *Neighborhood*

Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP-P2), masyarakat dituntut untuk berkreativitas dalam membuat tempat-tempat kumuh menjadi lebih asri, dan program ini akan membuat kapasitas sosial masyarakat meningkat. Masyarakat di pemukiman kumuh menjadi lebih produktif, mendapatkan kehidupan yang layak dan masyarakat lebih bertanggung jawab dalam perbaikan pemukiman kumuh dan penjagaan fasilitas dari program tersebut.

Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) ini telah dilaksanakan di beberapa permukiman kumuh di Indonesia. Pada tahun 2017 program tersebut tersebar di 16 Provinsi dan 20 Kota/Kabupaten dan telah mengalami pengurangan kawasan kumuh. Beberapa diantaranya, Makasar, Palopo, Kendari, Bone, Serang, Sukabumi, Banjarmasin, Ambon, Bima, Pasuruan, Semarang, Pekalongan, Tanjung Jabung Barat, Batam, Tanjung Balai, Kapuas, Palembang, Palangkaraya, dan Lampung. Program tersebut telah dilaksanakan di provinsi penerima program, beberapa di antaranya yakni di Semarang terdapat permukiman kumuh seluas 234,15 HA dan telah ditangani seluas 85,10 HA, di Bengkulu terdapat permukiman kumuh seluas 224,05 HA dan telah ditangani seluas 85,31, dan Tanjung Jabung Barat terdapat permukiman kumuh seluas 255,20 HA dan telah ditangani seluas 87,70 HA dan Provinsi Lampung tepatnya di Kota Bandarlampung terdapat permukiman kumuh seluas 213,39 HA dan telah ditangani seluas 87,05 HA. (sumber: [http://www.nusp2.id/files/Paparan Asisten PMU Evaluasi 2017](http://www.nusp2.id/files/Paparan_Asisten_PMU_Evaluasi_2017), diakses pada 2 desember 2018)

Di Provinsi Lampung sendiri, Kota Bandar Lampung yang menjadi penerima manfaat oleh Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2). Berdasarkan SK Walikota No. 974 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh menetapkan 26 Kelurahan yang menjadi penerima Program ini, tetapi melalui Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) ini, hanya 17 kelurahan dan 9 kecamatan saja yang akan diperbaiki.

Table 1. Penetapan Lokasi Target Penanganan Kawasan Kumuh Penerima Program NUSP Phase 2 Kota Bandarlampung Tahun 2015-2017.

No.	Kelurahan	Kecamatan	Luas Kawasan Kumuh	Tingkat Kekumuhan
1	Kota Karang Baru	Teluk Betung Timur	16,60 Ha	Kumuh sedang
2	Kota Karang	Teluk Betung Timur	20,00 Ha	Kumuh sedang
3	Gedung Pakuon	Teluk Betung Selatan	6,58 Ha	Kumuh sedang
4	Negeri Olok Gading	Teluk betung selatan	6,00 Ha	Kumuh sedang
5	Talang	Teluk Betung Selatan	9,42 Ha	Kumuh sedang
6	Kangkung	Bumi Waras	21,03 Ha	Kumuh Berat
7	Bumi Waras	Bumi Waras	14,46 Ha	Kumuh sedang
8	Bumi Raya	Bumi Waras	8,64 Ha	Kumuh sedang
9	Sukaraja	Bumi Waras	42,50 Ha	Kumuh sedang
10	Pidada	Panjang	6,63 Ha	Kumuh Berat
11	Karang Maritim	Panjang	2,00 Ha	Kumuh Berat
12	Srengsem	Panjang	1,50 Ha	Kumuh Berat
13	Campang Raya	Sukabumi	5,06 Ha	Kumuh sedang
14	Sukamenanti	Kedaton	6,94 Ha	Kumuh sedang
15	Kebon Jeruk	Tanjung Karang Timur	20,08 Ha	Kumuh sedang

16	Sukaraja Baru	Tanjung Karang Barat	12,51 Ha	Kumuh sedang
17	Gunung Sulah	Wayhalim	19,10 Ha	Kumuh sedang
	17 Kelurahan	9 Kecamatan	219,14 Ha	

Sumber: Badan perencanaan dan pembangunan daerah kota Bandar Lampung, 2015 dalam Emi

Pada Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) tersebut Kota Bandarlampung telah melaksanakan program ini sejak 2015 sampai 2017 dan telah diimplementasikan kepada kawasan-kawasan kumuh yang telah terpilih. Dari 17 kelurahan tersebut, Kecamatan Bumi Waras menjadi Kecamatan yang paling luas menerima program tersebut. Adapun kelurahan yang menerima program ini yakni, Bumi Waras, Kangkung, Sukaraja, dan Bumi Raya. Berdasarkan data diatas, penelitian ini memfokuskan pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras, karena Kelurahan Kangkung tersebut memiliki tingkat kumuh yang berat dan salah satu yang terluas.

Tidak hanya itu, permasalahan kumuh di Kelurahan Kangkung ditunjukan dengan lebih dari 75% kondisi bangunan tidak memiliki keteraturan, hal ini disebabkan oleh sebagian besar permukiman kumuh berada pada lokasi yang datar sekitar pesisir pantai dengan tingkat kepadatan bagunana rata-rata 100,5 unit/hektar. Permasalahan kumuh di Kelurahan Kangkung juga diakibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana lingkungan, seperti jalan lingkungan, drainase, dan persampahan. Berdasarkan permasalahan diataslah peneliti memfokuskan untuk meneliti di Kelurahan Kangkung.

Penyelenggaraan program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) telah dijalankan untuk menuntaskan permasalahan kumuh. Dalam pengimplementasian sebuah kebijakan, maka diperlukan pula sebuah evaluasi kebijakan. Karena evaluasi merupakan suatu tahapan yang penting dalam kebijakan publik. Tidak terkecuali kebijakan dalam program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2), program ini pun perlu memerlukan sebuah evaluasi yang mana evaluasi ini akan menilai suatu kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum mencapai tujuan yang diinginkan.

Alasan mengapa sebuah evaluasi diperlukan, pendapat ini ditegaskan oleh Suharno (2013:221-222) menyatakan bahwa sebuah evaluasi diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses atau sebaliknya. Selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak. Terakhir, untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti “**Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) di Kota Bandar Lampung**” (Studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan, maka permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana hasil dari pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) di Kota Bandar Lampung” (Studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras) ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang diangkat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil dari pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) di Kota Bandar Lampung” (Studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil dari penelitian ini mampu memberikan masukan dan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai evaluasi suatu program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan cara yang berbeda serta dengan informan yang lebih baik lagi.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota

Bandarlampung dalam mewujudkan pemukiman-pemukiman yang memadai bagi masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga terciptanya suasana dan lingkungan yang sehat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang berjalan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis :

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
Ahmad Renaldi Saputra (2016)	Implementasi Program <i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project</i> di Kota Bandar Lampung	Pelaksanaan program <i>neighborhood upgrading and shelter project</i> tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana program penanganan permukiman kumuh yang termuat dalam SIAP, NUAP, dan RKM dan program tersebut dilaksanakan pada 21 RT di Kelurahan Serengsem. Adapun hambatan pada program ini	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Renaldi Saputra membahas mengenai implementasi program <i>neighborhood upgrading and shelter project</i> yang dilaksanakan di Kelurahan Serengsem. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan evaluasi program <i>neighborhood</i>

		adalah tahap perencanaan yang sangat singkat sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya pembangunan yang dilaksanakan dari segi kualitas hingga pengerjaannya, serta kurangnya koordinasi antara kecamatan dan kelurahan.	<i>upgrading shelter and project phase 2</i>
Emi Marta Sari (2016)	Implementasi Program <i>Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2</i> (Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)	Pelaksanaan program penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan pada kelurahan Kangkung tersebut dikatakan sudah dilakukan dengan baik, hal tersebut dinilai melalui komunikasi, sumberdaya, disposisi serta struktur birokrasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut. Hambatan yang terjadi yaitu masih kurangnya buku petunjuk teknis yang belum di keluarkan sehingga menghambat proses pengerjaan, selain itu masih banyak	Penelitian yang dilakukan oleh Emi Marta Sari membahas mengenai implementasi program <i>neighborhood upgrading and shelter project</i> yang dilaksanakan di Kelurahan Kangkung, yang menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan program tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas mengenai evaluasi program tersebut yang mana penelitian ini membahas setelah adanya pelaksanaan program

		masyarakat yang tidak membantu pengerjaan.	tersebut..
Rahmawati (2016)	Partisipasi Masyarakat Dalam Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 (Nusp-2) di Gedong Pakuan Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung	Partisipasi masyarakat di Gedong pakuan tersebut dilihat dari kemampuan berpartisipasi, maka masyarakat di Gedong Pakuan mampu berpartisipasi dalam hal mengungkapkan pendapatnya terkait prioritas pembangunan serta mampu dalam hal tenaga.	Penelitian yang dilakukan oleh rahmawati membahas mengenai keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, mengenai evaluasi program tersebut yang mana penelitian ini membahas setelah adanya pelaksanaan program tersebut

Sumber : *Diolah Oleh Peneliti, 2019*

B. Kebijakan Publik

Terdapat banyak sekali batasan maupun definisi mengenai kebijakan politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut Budi Winarno dalam Suharno (2013:10) mengatakan karena perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya dapat diramalkan.

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Robert Eyeston dalam Suharno (2013:10-11) mengatakan bahwa ‘secara luas’ kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Jones dalam Suharno (2013:11) mengatakan bahwa kebijakan publik digunakan untuk memberikan definisi kebijaksanaan negara. Konsep yang ditawarkan ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksudkan dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Suharno (2013:11) yang dinyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan, sedangkan menurut W.I Jenkis dalam Suharno (2013:11-12) yang merumuskan kebijaksanaan publik sebagai “*a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation wher these decisions should, in prinsciple, be within the power of these actors to achieve*” (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Chief J.O Udoji dalam Suharno (2013:12) mengatakan bawa kebijakan publik “*an sanctioned course of action*

addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large” (suatu tindakan beraksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat). Pendapat lain dikemukakan oleh James Anderson dalam Leo (2008:7) memberikan pengertian kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai berikut: “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan”.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang diputuskan oleh aktor atau sekelompok aktor politik untuk dilakukan atau tidak dilakukan kebijakan tersebut demi menuju tujuan yang telah di tentukan dalam situasi untuk mensejahterakan masyarakat.

1. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Easton dalam Suharno (2013:14-15) Ciri kebijakan publik yang utama adalah yang disebutkan sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik dan orang-orang yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan-urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu. Implikasi dari pernyataan diatas menyimpulkan bahwa:

- a. Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam politik sistem modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kedua, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk membuat undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Ketiga, kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi dan menggalakkan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut.
- d. Keempat, kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuknya yang positif, mungkin akan mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.

2. Jenis Kebijakan Publik

Banyak pakar mengajukan kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. James Anderson dalam Suharno (2013:15-16) menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut ;

- a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan,
- b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat,
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran, sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran,
- d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*). Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang bertujuan mengatur pemberian barang atau pelayanan publik, sedangkan kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Berdasarkan jenis dari kebijakan publik yang telah dipaparkan , penelitian ini termasuk kedalam jenis kebijakan substantif dan kebijakan prosedural dikarenakan kebijakan *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* tersebut dilakukan pemerintah dengan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan dijalankan melalui pemerintah Kota Bandarlampung. Pemerintah Kota Bandarlampung melaksanakan program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* karena program tersebut merupakan program perbaikan kawasan kumuh diperkotaan yang bertujuan mewujudkan pemerintah Kota/Kabupaten yang mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

3. Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut.Nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakna, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *forecasting*, rekomendasi kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual. Pakar kebijakan publik Anderson dalam Suharno (2013: 25-26) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

a. Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah.

b. Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

c. Penentuan kebijakan (*adaption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

d. Implementasi (*implementation*)

Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

e. Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Howlet dan Ramesh dalam Suharno (2013:26) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.

- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Berdasarkan proses kebijakan diatas, peneliti memilih melakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan evaluasi diperlukan untuk mengetahui suatu kebijakan maupun program berjalan dengan baik atau tidak. Tidak terkecuali dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) tersebut., apakah program tersebut telah mencapai tujuan yang ditetapkan atau belum selain itu adakah kendala-kendala yang di hadapi.

C. Evaluasi Kebijakan Publik

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Evaluasi merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya dengan formulasi dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Lester dan Stewart dalam Suharno (2013:185) evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan

suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Sedangkan menurut Wirawan (2012:7) evaluasi adalah “Riset untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut”.

Menurut Husni (2010:971) mengatakan bahwa “evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai hasil penilaian atas permasalahan yang ditemukan”. Sedangkan menurut Arikunto (2010:1) “evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Anderson dalam jurnal Akbar (2016:51) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan, sedangkan menurut Stufflebeam dalam jurnal Akbar (2016:51) mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan. Pendapat lainnya menurut Vending dalam Wirawan (2012:16) mengatakan bahwa evaluasi melihat ke belakang agar dapat menyetir ke depan. Evaluasi merupakan mekanisme untuk memonitor, mensistematikan, dan meningkatkan aktivitas pemerintah dan hasil-hasilnya sehingga pejabat publik dalam pekerjaannya di masa yang akan datang dapat bertindak serta bertanggung jawab, kreatif, dan seefisien mungkin.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah untuk menyajikan penilaian, serta menentukan hasil yang telah dicapai dengan membandingkan indikator evaluasi serta hasilnya dapat memberikan atau dipergunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2. Evaluasi Kebijakan

Sebuah kebijakan harus dievaluasi untuk menentukan apakah kebijakan tersebut bermanfaat, dapat mencapai tujuannya, dilaksanakan secara efisien dan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Lester dan Stewart dalam Winarno (2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda. Tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang.

Menurut Dunn dalam Nugroho (2011:670) mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan sebagai pemberi informasi mengenai nilai manfaat dari suatu hasil kebijakan yang bisa dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target dan evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu penilaian yang mencakup implementasi serta dampak pelaksanaan kebijakan tersebut untuk mengetahui keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan.

3. Tujuan Evaluasi kebijakan

Evaluasi ini terdapat tujuan menurut Subarsono (2016:120-122), evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik

4. Pentingnya Evaluasi Kebijakan

Terdapat beberapa alasan untuk menjawab mengapa perlu ada kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi, internal dan eksternal. Suharno (2013:221-222) memberikan pernyataan bahwa alasan evaluasi kebijakan publik yang bersifat internal antara lain:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses ataukah sebaliknya.
- b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- c. Untuk menjamin terhindarnya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan

dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Sedangkan alasan yang bersifat eksternal paling tidak untuk dua kepentingan:

- a. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- b. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

Menurut Syamsudin Evaluasi kebijakan juga memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi tentang kerja kebijakan
2. Mendorong seseorang untuk lebih memahami maksud, kualitas dan dampak kebijakan.
3. Umpan balik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/penyempurnaan implementasi
4. Memberikan rekomendasi pada pembuatan kebijakan.

5. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Suharno (2013:224-227) mengatakan bahwa ada tiga pendekatan besar dalam evaluasi kebijakan, yakni evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teotitis. Masing-masing pendekatan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Evaluasi Semu

Evaluasi senu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid tentang hasil kebijakan, tanpa mempersoalkan lebih jauh tentang nilai dan manfaat dari hasil kebijakan tersebut bagi individu, kelompok sasaran, dan masyarakat dalam skala luas.

Metode-metode yang banyak digunakan dalam pendekatan evaluasi semu adalah rancangan quasi-eksperimen, kuesioner, *random sampling*, dan teknik-teknik statistic. Pendekatan evaluasi semu ini relevan dengan seluruh pendekatan pemantauan kebijakan, yakni akuntansi system social, eksperimentasi social, pemeriksaan social, dan sintesis riset-praktik.

2. Evaluasi Formal

Evaluasi formal (*formal evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghimpun informasi yang valid mengenai hasil kebijakan dengan tetap melakukan evaluasi atas hasil tersebut berdasarkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dan diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan tenaga administatif kebijakan.

Evaluasi formal terdiri dari evaluasi sumatif dan formatif. Evaluasi yang bersifat sumatif adalah evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian target atau tujuan segera setelah selesainya suatu kebijakan yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya bersifat pendek dan menengah. Sedangkan evaluasi formatif merupakan evaluasi yang dilakukan secara terus menerus dalam waktu yang relatif panjang untuk memantau pencapaian target dan tujuan suatu kebijakan.

Evaluasi formal ini memiliki beberapa varian, antara lain: *pertama*, evaluasi perkembangan. Yang dimaksud dengan evaluasi perkembangan adalah kegiatan penilaian yang secara eksplisit ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari staf program. *Kedua*, evaluasi proses retrospektif. Evaluasi ini terdiri dari pemantauan dan evaluasi setelah suatu kebijakan dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Evaluasi ini hanya didasarkan diri pada informasi yang telah ada tentang kebijakan yang sedang berjalan, yang berhubungan secara langsung hasil output dan dampak kebijakan. *Ketiga*, evaluasi proses retrospektif. Evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi atas hasil kebijakan tanpa melakukan kontrol secara langsung terhadap *input* dan proses kebijakan. *Keempat*, evaluasi eksperimental. Berbeda dengan dua dengan variabel sebelumnya, evaluasi ini meliputi pemantauan dan evaluasi atas hasil kebijakan dengan melakukan kontrol secara langsung atas *input* dan proses kebijakan.

3. Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (*decision-theoretic evaluation*) adalah kegiatan evaluasi yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk

mengumpulkan informasi yang valid dan akuntabel tentang hasil kebijakan, yang dinilai secara eksplisit oleh para pelaku kebijakan. Evaluasi jenis ini bertujuan untuk menghubungkan antara hasil kebijakan dengan nilai-nilai dari para pelaku kebijakan tersebut.

6. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe evaluasi kebijakan tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis. Peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Kebijakan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2*, dan mencari tahu apakah kebijakan yang telah di laksanakan tersebut telah mencapai tujuan yang ingin dicapai.

7. Kriteria Keberhasilan Kebijakan

Keberhasilan kebijakan atau program juga dikaji berdasarkan perspektif proses implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup antara lain :

- a. Cara pelaksanaan
- b. Agen pelaksana
- c. Kelompok sasaran
- d. Manfaat program

Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

(sumber: <https://rudisalam.files.wordpress.com/2010/01/artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-2008>, di akses pada 18 oktober 2018 Pukul 19:58)

8. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Suharto (2008:40) evaluasi kebijakan pada dasarnya merupakan alat untuk mengumpulkan dan mengelola informasi mengenai program atau pelayanan yang diterapkan. Evaluasi kebijakan menyediakan data dan informasi yang biasa dipergunakan untuk menganalisis kebijakan dan menunjukkan rekomendasi-rekomendasi bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar implementasi kebijakan berjalan efektif sesuai dengan kriteria yang diterapkan. Kriteria evaluasi biasanya dirumuskan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut:

- a. Indikator masukan (*input indicators*): bahan-bahan dan sumberdaya yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan;
- b. indikator proses (*procces indicators*): cara-cara dengan mana bahan-bahan dan sumberdaya diolah atau ditransformasikan menjadi penyedia pelayanan;
- c. indikator keluaran (*output indicators*): barang-barang atau pelayanan-pelayanan yang diproduksi oleh suatu program.
- d. indikator dampak (*outcome indicators*): hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program.

Selain itu pendapat lainnya juga muncul dari para ahli lainnya, menurut Dunn (2003) mengevaluasi suatu program atau kebijakan diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi sebagai berikut :

Tabel 3. Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pertanyaan
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah tercapai ?
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan ?
Kecukupan	Seberapa jauh hasil pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ?
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu ?
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

Sumber: Dunn (2003:610)

Kriteria-kriteria diatas merupakan tolak ukur atau indikator dari evaluasi kebijakan publik. Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka pembahasan dalam penelitian ini berhubungan dengan pertanyaan yang dirumuskan oleh William Dunn untuk setiap kriterianya. Untuk lebih jelasnya setiap indikator diatas akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Dunn (2003:429) mengatakan bahwa efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara dekat dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya, sedangkan menurut Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait

dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pendapat lain datang dari Suharno (2013:223) mengatakan bahwa efektivitas menekankan pada ketercapaian hasil, apakah hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai.

2. Efisiensi

Menurut Dunn (2003:430) berpendapat bahwa efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Pendapat lain menurut Suharno (2013:223) mengatakan bahwa efisiensi memfokuskan pada persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dunn (2003:430) mengemukakan bahwa kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa kecukupan lebih mempersoalkan

kememadaan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Menurut Dunn (2003:430-431) dalam kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kriteria tersebut berkenaan dengan empat tipe masalah, yaitu:

1. Masalah tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas risorsis yang tersedia.
2. Masalah tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
3. Masalah tipe III. Masalah pada tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
4. Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternative kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisiensi, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran. Kemudian Suharno (2013:223) mengatakan bahwa pemerataan menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak

kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Kemudian Suharno (2013: 223-224) mengatakan bahwa responsivitas lebih menekankan kepada aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak.

Dunn (2003:437) pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan dan ketepatan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.

6. Ketepatan

Dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tersebut. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2003:499) menyatakan bahwa kelayakan (*Appropriateness*) adalah kriteria yang dipakai untuk menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini

menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Pendapat lain datang dari Winarno (2002: 184) mengatakan bahwa ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut. Pendapat lain dikemukakan oleh Suharno (2013:224) yang mengatakan bahwa ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

Melihat dari kriteria yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tipe penelitian dari William Dunn sebagai dasar acuan dalam penelitian. Merujuk pada berbagai permasalahan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti menggunakan enam kriteria evaluasi Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan untuk menganalisis bagaimana Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* di Kelurahan Kangkung.

9. Masalah dalam Evaluasi Kebijakan

Untuk meneliti suatu kebijakan berhasil ataupun gagal, maka diperlukan tahapan-tahapan untuk mengevaluasi suatu kebijakan. Evaluasi merupakan proses yang rumit dan kompleks, karena memang dalam evaluasi melibatkan berbagai macam kepentingan individu-individu. Namun dalam proses evaluasi suatu kebijakan tentunya ada beberapa masalah-masalah yang dihadapi oleh peneliti.

Hogwood dan Gunn dalam Winarno (2012:245) mengidentifikasi beberapa masalah berat yang menjadi kendala dalam evaluasi kebijakan publik atau program. Masalah-masalah tersebut sebagai berikut:

a. Tujuan-tujuan kebijakan

Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau dengan kata lain tujuan tersebut tidak dapat diukur dengan tidak adanya kriteria yang jelas untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan maka tujuan akan terlihat samar-samar. Kekaburan dalam tujuan kadangkala merupakan konsekuensi dari perbedaan-perbedaan titik pandangan mengenai tujuan-tujuan kebijakan.

b. Membatasi kriteria untuk keberhasilan

Bahkan pada saat tujuan kebijakan secara jelas menyatakan ada masalah tentang bagaimana keberhasilan tujuan itu akan diukur. Maka tujuan tersebut akan berubah dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Efek samping

Dampak-dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan ataupun program seringkali mempengaruhi evaluasi kebijakan tersebut. Kesulitan yang biasanya muncul pada saat orang mencoba untuk mengidenifikasi dan

mengukur efek-efek/pengaruh sampingan dan memisahkan efek tersebut dari kebijakan atau program yang sedang dievaluasi. Terdapat masalah-masalah tentang faktor-faktor yang merugikan maupun faktor-faktor yang menguntungkan serta seberapa besar faktor ini dipertimbangkan secara relatif dengan tujuan-tujuan pokok kebijakan.

d. Masalah data

Informasi yang diperlukan untuk menilai dampak yang ditimbulkan dari suatu kebijakan atau program tidak tersedia atau mungkin saja tersedia namun dalam bentuk yang tidak cocok.

e. Masalah metodologi

Masalah yang seperti ini umum untuk masalah tunggal, atau suatu kelompok penduduk, menjadi target dari beberapa program dengan tujuan yang sama atau saling berkaitan.

f. Masalah politik

Evaluasi bisa menimbulkan ancaman bagi beberapa orang. Keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan atau program di mana politisi atau para birokrat memiliki komitmen terhadap karier secara pribadi, dan dari mana kelompok-kelompok klien menerima keuntungan yang sedang dievaluasi. Pertimbangan-pertimbangan ini jelas akan memengaruhi bagaimana hasil evaluasi bisa dijalankan, sebagai bentuk kerjasama para pejabat publik dan klien.

g. Biaya

Ini bukan tidak umum untuk evaluasi suatu program terhadap biaya sebesar satu persen dari total biaya program biaya seperti ini merupakan pengalihan dari pemberian kebijakan atau program.

Anderson dalam Winarno (2012:248) menyatakan setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan, yakni:

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai.
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.
- c. Masalah publik seringkali disebabkan karena banyak faktor sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan atau beberapa masalah saja.
- d. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan.
- e. Tujuan kebijakan tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain.
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut.
- g. Banyaknya masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.
- h. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.

10. Tahap-Tahap Evaluasi Kebijakan

Setelah mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi di harapkan peneliti dapat melakukan tahapan-tahapan evaluasi. Menurut Dunn dalam Santosa, (2008:44) ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi kebijakan antara lain:

- a. Spesifikasi program kebijakan
- b. Apakah kegiatan-kegiatan dan sasaran yang melandasi program
- c. Koleksi informasi program kebijakan
- d. Modeling program kebijakan
- e. Penaksiran evaluabilitas program kebijakan
- f. Umpan balik penaksiran evaluabilitas untuk pemakai

Selain itu pendapat lain tentang langkah-langkah evaluasi kebijakan juga dilontarkan oleh beberapa ahli salah satunya Edward A. Suchman. Suchman dalam Winarno (2012:233) mengemukakan ada enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- b. Analisis terhadap masalah
- c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan
- d. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi
- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- f. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Tahap-tahap evaluasi kebijakan suchman dalam Winarno (2012:233) juga mengidentifikasi beberapa pertanyaan dalam menjalankan evaluasi yakni :

- a. Apakah yang menjadi isi tujuan program ?
- b. Siapakah yang menjadi target program ?
- c. Kapan perubahan yang diharapkan terjadi ?
- d. Apakah tujuan yang ditetapkan satu atau banyak ?
- e. Apakah dampak yang diharapkan besar ?
- f. Bagaimana tujuan tersebut dicapai ?

D. Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2)

Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2 (NUSP-Phase 2) adalah program penanganan kawasan permukiman kumuh dipertanian melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sector swasta, serta penguatan sistem kelembagaan daerah untuk menjamin terlaksananya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di pertanian yang mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada masyarakat. Pelaksanaan program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) berbasis pemberdayaan masyarakat dan melibatkan peran aktif pemangku kepentingan di daerah, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan baerbagai persoalan terkait kualitas kawasan permukiman. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan lebih besat dari perangkat pemerintahan daerah serta berbagai pihak untuk

memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan pembangunan yang dicapai.

Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* terbentuk didasari dengan amanat RPJMN 2015-2019 yang mengeluarkan PERMEN PUPR Nomor 2/PRT/M 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh. Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) di danai melalui pinjaman *Asian Development Bank* (ADB) dan perjanjian pinjaman dana antara pemerintah dan *Asian Development Bank* (ADB) tertuang dalam perjanjian No. 3122-INO tanggal 23 april 2014. Pelaksanaan kegiatan *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintah Kota/Kabupaten dan masyarakat yang berdaya saing dan mampu menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, sehat serta produktif secara mandiri dan berkelanjutan. untuk mewujudkan pencapaian kota tanpa kumuh pada tahun 2020. Indikasi perumahan atau permukiman yang layak huni yaitu dengan tersedianya standar sebagai berikut: tersedianya jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, proteksi kebakaran (sumber: <https://www.slideshare.net/bogesi/kebijakan-pelaksanaan-nusp2>) diakses pada 19 oktober 2018 Pukul 10:09)

1. Tujuan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2*

Secara umum, tujuan pelaksanaan *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* adalah untuk menangani kawasan permukiman kmuh

perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta serta kelompok peduli dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal dalam rangka pemenuhan kebutuhan hunian yang sehat, layak dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan.

Secara khusus tujuan program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* adalah:

- a. Meningkatkan kualitas permukiman dan mengurangi proporsi rumah tangga kumuh diperkotaan,
- b. Memfasilitasi kelompok masyarakat miskin dalam pengadaan hunian yang layak dan terjangkau melalui pembangunan kawasan permukiman baru,
- c. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat didalam menyusun perencanaan pembangunan kota secara partisipatif dengan penekanan pada pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang,
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok peduli terhadap upaya penganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan kondisi social-ekonomi masyarakat,
- e. Menumbuhkan kesadaran kritis dan kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan permukiman yang sehat, layak dan produktif.

2. Sasaran Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase*

2

Pengembangan *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) memiliki sasaran fungsional dan sasaran operasional sebagai berikut:

1. Sasaran Fungsional

- a. Terlembaganya pendekatan partisipatif dalam pengembangan perencanaan permukiman oleh masyarakat secara harmonis yang didukung oleh pemerintah daerah,
- b. Tercapainya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani permasalahan perumahan dan permukiman bagi Komunitas Berpenghasilan Rendah (KBR) yang tinggal di lingkungan permukiman kumuh dan tidak layak,
- c. Teralokasikannya dukungan kebijakan dan pembiayaan oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman bagi KBR,
- d. Terbangunnya sistem pembiayaan perumahan yang didukung oleh lembaga keuangan formal pada tingkat pemerintah pusat dan daerah, sehingga program pengembangan perumahan dan permukiman bagi KBR dapat terselenggara secara harmonis dan berkelanjutan, dan
- e. Terbangunnya sistem penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman yang berdaya guna dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung produktivitas KBR.

2. Sasaran Operasional

- a. Terbangunnya kelembagaan lokal sebagai representasi warga masyarakat
- b. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang mampu melakukan peran dan fungsi sebagai fasilitasi *role sharing* dengan pelaku kunci serta membangun aksesibilitas dan posisi tawar KBR terhadap pemerintah,
- c. Terfasilitasinya aksesibilitas KBR terhadap kredit mikro perumahan,dan
- d. Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni pada lingkungan permukiman yang sehat dan harmonis.

Penerima manfaat dalam pelaksanaan *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) adalah KBR yang berdomisili dilingkungan kumuh yang termasuk kategori sasaran sebagaimana tertera didalam hasil pemetaan yang dilakukan secara partisipatif oleh warga. KBR akan memperoleh fasilitasi sebagai berikut :

- a. KBR akan mendapatkan bantuan teknis dalam hal penyusunan usulan, akses kepada lembaga keuangan, bimbingan teknis dalam pembangunan fisik serta dukungan pembinaan lain sesuai kebutuhan yang telah teridentifikasi,
- b. KBR dapat memperoleh kredit mikro perumahan sesuai kemampuan bayar (*repayment capacity*) yang didukung dengan bimbingan teknis yang diberikan oleh konsultan/fasilitator,

- c. KBR akan mendapatkan kegiatan lokakarya dan pelatihan, agar masyarakat semakin peka dan mampu menganalisis permasalahan yang dihadapi serta mampu menyusun perencanaan secara partisipatif, menggali sumberdaya yang ada di sekitarnya serta mampu mendayagunakan sumberdaya secara tepat dan bermanfaat, dan
- d. KBR akan memperoleh pengalaman dalam membangun, mendayagunakan dan mengembangkan kelembagaan lokal dalam upaya peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan mereka.

(sumber: Ahmad Renaldi Saputra. 2016. *Implementasi Program Neighborhood Upgrading Shelter and Project di Kota Bandarlampung*. Bandarlampung. Universitas Lampung).

E. Permukiman Kumuh

1. Pengertian Pemukiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman. Pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung (kota dan desa) yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pemukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa permukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup.

Pengertian pemukiman menurut Sastra dan Marlina dalam Dian (2009: 12) adalah suatu tempat bermukim manusia yang menunjukkan suatu tujuan tertentu. Pemukiman memiliki dua makna yang berbeda yaitu: a. Isi, yaitu menunjukkan pada manusia sebagai penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitarnya. b. Wadah, yaitu menunjukkan pada fisik hunian yang terdiri alam dan elemen-elemen buatan manusia. Awal dibangunnya tempat tinggal semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik, selanjutnya pemilihan tempat tinggal berkembang fungsinya sebagai kebutuhan psikologis, estetika, menandai status sosial, ekonomi dan sebagainya. Demikianlah makna pemukiman yang ada pada masyarakat pada saat ini.

2. Pengertian Pemukiman Kumuh

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Pasal 22 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, pemukiman kumuh adalah pemukiman tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, tidak terlayani prasarana lingkungan yang memadai, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya. Secara umum, daerah kumuh (slum area) diartikan sebagai kawasan pemukiman atau pun bukan kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang bangunan-bangunannya berkondisi substandard atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat. Pemukiman kumuh dianggap sebagai tempat anggota masyarakat kota yang mayoritas berpenghasilan rendah dengan membentuk pemukiman tempat tinggal dalam kondisi minim.

Lingkungan permukiman akan terjadi proses kekumuhan apabila penduduk berpenghasilan rendah menempati daerah yang serba terbatas tanah, fasilitas sarana prasarana dan sebagainya sehingga kondisi lingkungan menjadi padat dan kurang kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri dan lingkungan. Menurut Raharjo (2005: 147) penyebab kumuh dapat dilihat dari:

- a. Segi fisik yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara.
- b. Segi masyarakat atau sosial yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti membuang sampah.

3. Ciri-Ciri Permukiman Kumuh

Menurut Rahardjo (2010: 117) Penggunaan lahan yang tidak efisien dan efektif, menurunnya kualitas lingkungan hidup, serta munculnya kantong-kantong permukiman kumuh di kota, telah menjadi ciri-ciri perkembangan kota-kota di Indonesia. Di samping itu pembangunan fasilitas sosial, ekonomi dan fisik yang terpusat di kawasan perkotaan merupakan salah satu faktor penarik (*full factor*) dari suatu kota. Adapun faktor pendorong munculnya permukiman kumuh menurut Sadyohutomo dalam Muhammad Irfan (2018:31-32) yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, tidak diimbangi dengan pendapatan yang cukup. Pertumbuhan penduduk kota terdiri dari dua sumber. Pertama, karena migrasi masuk dan kedua, karena pertumbuhan penduduk kota yang tinggi. Akibat tingkat pendapatan yang rendah, mereka tidak mampu mengakses permukiman yang layak, sehingga ikut berjubel dengan

permukiman yang ada, membangun rumah di pinggiran kota tanpa mengindahkan standar permukiman.

2. Keterlambatan pemerintah kota dalam merencanakan dan membangun prasarana (terutama jalan) pada daerah pengembangan permukiman baru. Seiring dengan kebutuhan perumahan yang meningkat maka masyarakat secara swadaya memecah memecah bidang tanah dan membangun permukiman mereka. Akibatnya, bentuk dan tata letak kaveling tanah menjadi tidak teratur dan tidak dilengkapi dengan prasarana dasar permukiman seperti penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, penanganan banjir dan drainase.

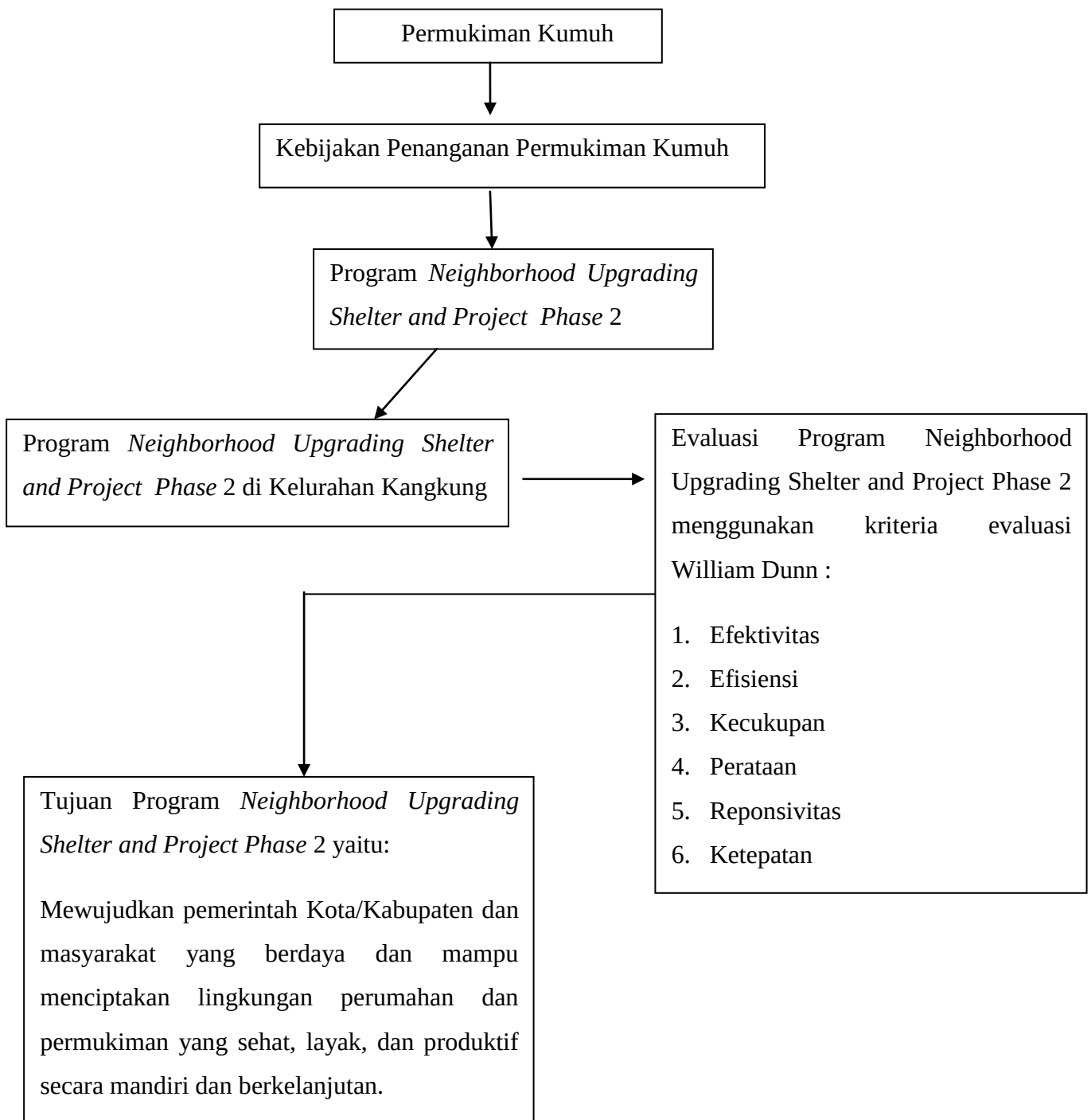
F. Kerangka Pikir

Perkembangan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan sendiri hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membangun sarana dan aspek penunjang dalam kehidupan, oleh sebab itu pembangunan merupakan hal yang diperlukan bagi suatu negara.

Berkembangnya suatu pembangunan menyebabkan terjadinya tumbuh laju penduduk yang meningkat, sehingga berdampak pada kehidupan wilayah perkotaan yang semakin padat. Wilayah perkotaan yang padat tersebut, menimbulkan dampak seperti permukiman-permukiman kumuh. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah menggunakan Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2). Program ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat,

layak, dan produktif secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan penelitian secara langsung di lapangan untuk mengevaluasi apakah program ini telah mencapai hasil yang ingin dicapai atau sebaliknya.

Berdasarkan data dan hasil observasi di lapangan salah satu permukiman kumuh yang terluas dan termasuk kedalam kategori kumuh berat yakni di Kelurahan Kangkung, maka peneliti berusaha mengevaluasi Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-P2) di kelurahan tersebut menggunakan kriteria evaluasi William Dunn efektivitas, efisiensi, pemerataan, kecukupan, ketepatan, dan responsivitas. Berikut kerangka pikir peneliti dapat dilihat dibawah:



Sumber: diolah oleh peneliti 2018

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti merupakan tipe penelitian deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Peneliti mengambil metode penelitian kualitatif karena penelitian ini berusaha melakukan pengumpulan data yang relevan dengan fakta-fakta yang ada guna memahami suatu keadaan secara holistik dengan melibatkan berbagai metode ilmiah dan ketertarikan peneliti terhadap suatu peristiwa ilmiah. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Moleong (2014:6) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian kualitatif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan peristiwa sebagai data yang akan dianalisis. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah informasi lebih dalam untuk mengetahui hasilnya.

Sugiyono (2013: 15) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber data dilakukan

secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Begitu pula dengan Bungin (2013: 48) sesuai dengan tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian melalui penelitian deskriptif, peneliti menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti melakukan penelitian deskripsi dan analisis Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2* Di Kota Bandarlampung (*NUSP-Phase 2*).

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dapat digunakan untuk pembatas bagi peneliti dalam proses pengumpulan data sehingga data yang didapatkan fokus terhadap masalah yang diteliti. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Evaluasi pelaksanaan program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* di kota Bandarlampung, yang diukur dengan enam indikator menurut Dunn: (2003:610)

- a. Efektivitas, yaitu untuk mengetahui apakah program *Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2* yang telah dilaksanakan di Kelurahan Kangkung sudah terlaksana dengan baik dengan melihat tujuan dan capaian yang diinginkan?

- b. Efisiensi, yaitu untuk mengetahui sumber daya manusia maupun finansial dari program *Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2* di Kelurahan Kangkung, dengan melihat biaya dan waktu yang digunakan.
- c. Kecukupan, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh hasil pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
- d. Perataan, yaitu untuk mengetahui apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu ?
- e. Responsivitas, yaitu untuk mengetahui apakah kebutuhan masyarakat terpenuhi dan apakah program tersebut memuaskan bagi kelompok sasaran.
- f. Ketepatan, yaitu untuk mengetahui apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai ?

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti mendapat atau memperoleh data-data berupa informasi yang relevan dalam mendukung penelitian tersebut.

tempat yang akan menjadi lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras. Peneliti memilih Kelurahan Kangkung sebagai tempat penelitian karena, kelurahan kangkung menjadi salah satu tempat kumuh yang terluas dan kelurahan kangkung tersebut termasuk ke dalam kumuh berat.

Alasan penelitian ini dilakukan hanya di kelurahan kangkung saja, karena faktor waktu kemudian kelurahan kangkung ini dianggap sudah mewakili Kota Bandar Lampung dengan alasan, kelurahan kangkung menjadi salah satu tempat kumuh yang terluas dan kelurahan kangkung tersebut termasuk ke dalam kumuh berat.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berupa data yang dihasilkan dari wawancara. Sumber data ditulis. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan menggunakan tata cara dalam panduan wawancara yang berkaitan dengan Program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* di Kota Bandarlampung (NUSP-P2).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dan lain-lain yang terkait dengan evaluasi program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* di Kota Bandarlampung (NUSP-P2).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk perbincangan, seni bertanya dan mendengar.

Wawancara bukanlah sebuah perangkat netral dalam memproduksi realitas.

Dalam konteks ini banyak perolehan jawaban yang akan di dapat.

wawancara menurut Irwan dalam Anis dan Sapto (2014:61) mengatakan bahwa metode wawancara merupakan suatu alat pengumpulan data yang digunakan dengan instrumen lainnya. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengambilan data. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang berpatokan pada pedoman wawancara, sebelum melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan kajian yang diteliti dan akan diajukan pada saat ada wawancara berlangsung serta peneliti melakukan pencatatan poin-poin penting agar mendapatkan hasil wawancara yang baik.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan atau pihak terkait yang dinilai memiliki informasi, antara lain :

Tabel 4. Daftar Informan

No.	Informan	Jabatan	Keterangan
1	Jhoni Asman, S.T	Pejabat Pembuat Komitmen <i>Program Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2</i>	Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung
2	Drs. Tajeri	Ketua LKM Kelurahan Kangkung	Lembaga Masyarakat
3	Drs. Ediyalis	Lurah Kelurahan Kangkung	Kelurahan Kangkung
4	Novi	-	Masyarakat
5	Ahmad	-	Masyarakat
6	Edi	-	Masyarakat

Sumber: diolah oleh peneliti, 2018

2. Observasi

Observasi merupakan bentuk pengamatan yang dilakukan di lingkungan penelitian. Menurut Bungin (2013: 143), metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati peneliti melalui penggunaan pancaindra. Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data-data yang fakta dan tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi yang berkaitan dengan kajian yang diteliti. Sebagian besar berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, dan lain-lain. Dokumentasi membantu untuk memahami fenomena, interpretasi, menyusun teori, dan validasi data. Adapun dokumentasi-dokumentasi yang peneliti dapatkan:

Tabel 5. Dokumen Terkait Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2*

No.	Dokumen
1	SK Walikota No. 974 Tahun 2014 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh menetapkan 26 Kelurahan
2	Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018

F. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:222), dalam penelitian kualitatif, instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian sebagai

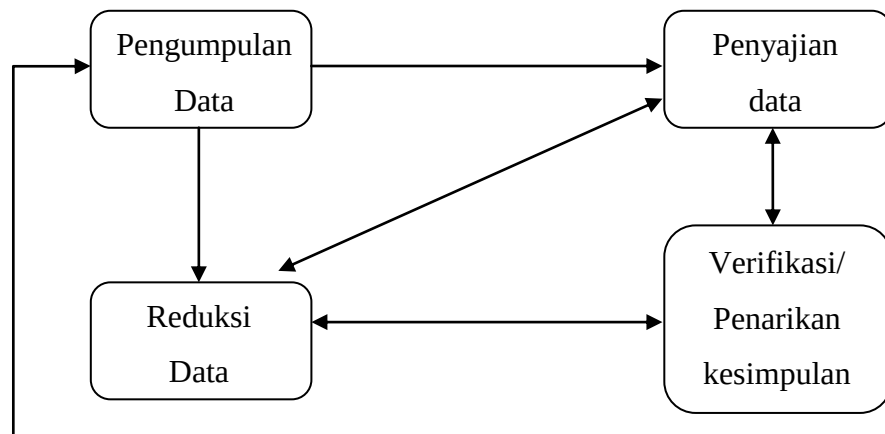
instrument juga harus di validasi seberapa jauh seberapa peneliti siap untuk melakukan penelitian yang selanjutnya akan terjun secara langsung ke lapangan. Adapun validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bisang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Validasi tersebut dilakukan oleh peneliti sendiri melalui evaluasi diri.

Peneliti pada penelitian kualitatif sebagai *Human Instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, pedoman, wawancara, dan dokumentasi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menurut Denzin dan Lincoln (2009) dalam Anis dan Sapto (2014:62) dalam penelitian kualitatif, manajemen analisis dan interpretasi data empiris adalah proses yang sangat kompleks. Selain itu menurut Hubberman dan Miles (1992) dalam Anis dan Sapto (2014:63) mengatakan bahwa tuntutan untuk melaksanakan penelitian kualitatif yang tepat cukup besar. Mengumpulkan data kualitatif merupakan suatu pelaksanaan kerja yang intensif, biasanya memakan waktu yang berbulan-bulan bukan bertahun-bertahun.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Data Interaktif yang disampaikan oleh Humbberman dan Miles terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, antara lain (Herdiansyah, 2010) :



Gambar 1: Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dapat dilakukan pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Untuk melakukan pengumpulan data agar sudah berpikir dan melakukan analisis ketika telah memutuskan untuk memulai penelitian. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah mendapat data yang cukup untuk diproses dan dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses penggabungan data dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*script*) yang dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil studi dokumentasi dan/atau hasil FGD diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan format masing-masing.

3. Penyajian data

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrumen pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (*script*), langkah selanjutnya adalah melakukan display data. Pada prinsipnya, display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan.

4. Kesimpulan/Verifikasi

Pada setiap penyajian indikator fokus penelitian, peneliti memberikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah peneliti sajikan. Hal tersebut peneliti lakukan untuk menyampaikan inti atau makna penting dari data yang telah diuraikan. Selain itu, dapat memudahkan peneliti untuk membuat kesimpulan akhir dari penelitian ini. Kesimpulan akhir pada penelitian ini menjurus pada jawaban dari masalah penelitian yaitu bagaimana hasil evaluasi program *neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* di Kota Bandar Lampung (studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras).

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2014:324) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik memeriksa Derajat Kepercayaan (*credibility*)

- a. Triangulasi

Dalam penelitian ini kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara langsung pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dan Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras.

2. Teknik memeriksa Keteralihan Data (*Transferability*)

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan uraian rinci, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan.

Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabulasi data serta disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan penelitian.

3. Teknik memeriksa Ketergantungan (*Dependability*)

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan penelitian di lapangan tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti mendiskusikannya dengan pembimbing. Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf kebenaran data serta penafsirannya. Peneliti perlu menyediakan data mentah, hasil analisis data dan hasil sintesis data serta catatan mengenai proses yang digunakan.

4. Kepastian (*confirmability*)

Kepastian data (*confirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan penelitian tentang keabsahan data, dalam hal ini yang melakukan pengujian hasil penelitian adalah pembimbing skripsi.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan Evaluasi Program *Neighborhood Upgrading Shelter and Project Phase 2* (NUSP-Phase 2) di Kota Bandar Lampung” (Studi pada Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras) dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah di jalankan secara optimal oleh masyarakat. Perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan telah menunjukkan hasil yang baik bagi masyarakatnya. Meski dijalankan dengan optimal dan menunjukkan hasil yang baik tetapi masih ada hal-hal yang tidak dilakukan dengan baik oleh masyarakat seperti dalam poin 3, yang mana dalam poin tersebut masyarakat masih enggan memanfaatkan memelihara prasarana yang diberikan. Untuk lebih jelas akan di paparkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam Pengendalian Efektivitas Program

NUSP-Phase 2

Permasalahan yang berkaitan dengan efektivitas dalam program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* yang dilakukan di Kelurahan Kangkung bisa dikatakan cukup efektif dalam penanganan permukiman kumuh. Penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Kangkung mulai dari perbaikan jalan, drainase, penanganan sampah telah di optimalkan perbaikannya dan melalui data yang ada dikatakan cukup efektif karena adanya luasan kumuh yang mengalami penurunan maupun luasan kumuh yang tetap. Untuk keseluruhan luasan kumuh yang ada telah mengalami penurunan sekitar 5% dari 21,03%.

2. Efisiensi Program *NUSP-Phase 2* Terhadap Sumber Daya Yang Terlibat

Mengenai program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* yang telah dilakukan di Kelurahan Kangkung dapat dikatakan sudah berjalan efisien dilihat dari sisi sumber daya finansial maupun manusia sama sama saling bersinergi satu sama lain. Dalam segi anggaran yang diberikan, LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) beserta masyarakat telah semaksimal mungkin dalam mengelola anggaran tersebut. Tidak hanya itu dari segi sumber daya manusianya pun, masyarakat yang selaku memiliki peran penting disini berpartisipasi penuh terhadap perbaikan prasarana lingkungan.

3. Kecukupan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Perbaikan Infrastruktur Lingkungan dalam Program *NUSP-Phase 2*

Program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2* di Kelurahan Kangkung telah dijalankan dengan baik oleh masyarakat, terbukti dengan adanya hasil perbaikan yang nyata setelah pelaksanaan program tersebut. Masyarakat di Kelurahan Kangkung cukup berpartisipasi di dalam program tersebut. Karena dalam program ini masyarakat sangat berperan penting mulai dari perencanaan, maupun pelaksanaannya. Tetapi setelah program tersebut dijalankan untuk partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan maupun pemanfaatan prasarana yang telah diberikan masih kurang, seperti penanganan sampah yang mana sampah masih sering dibuang sembarangan oleh masyarakat.

4. Perataan dalam Kesesuaian Tujuan Yang di Tetapkan Program *NUSP-Phase 2*

Melalui program tersebut, Kelurahan Kangkung telah melakukan program ini secara adil kepada masyarakat penerima program tersebut. Perbaikan yang telah dilakukan Kelurahan Kangkung telah dilaksanakan di Lingkungan II dan III, karena tingkat kemiskinan yang tinggi di dua lingkungan tersebut menjadikan lingkungan tersebut mendapatkan program *neighborhood upgrading shelter and project phase 2*. Kelurahan Kangkung juga memiliki kriteria tersendiri untuk memberikan program tersebut, layak atau tidaknya lingkungan tersebut mendapatkan programnya.

5. Responsivitas Masyarakat Terhadap Program *NUSP-Phase 2*

Respon yang diberikan masyarakat terhadap program *NUSP-Phase 2* di Kelurahan Kangkung dapat dikatakan baik, karena masyarakat menyambut baik adanya program tersebut dan setelah programnya dijalankan telah menunjukkan perubahan baik. Perbaikan yang diberikan mulai dari jalan, drainase penanganan sampah telah menunjukkan respon yang baik bagi masyarakat, karena perbaikan-perbaikan tersebut untuk wilayah di Kelurahan Kangkung tersebut.

6. Ketepatan Terhadap dampak Yang di Timbulkan Program *NUSP-Phase 2*

Program *NUSP-Phase 2* ini sudah tepat dijalankan di Kelurahan Kangkung, melalui perubahan-perubahan yang terjadi menimbulkan dampak yang positif dan negatif. Untuk dampak positif yang ditimbulkan yakni memudahkan masyarakat dalam beraktivitas sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan masih adanya masyarakat yang belum merasakan perubahan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan oleh peneliti diantaranya adalah:

1. Dinas Pekerjaan Umum beserta LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) dan Lurah Kelurahan Kangkung melakukan pemeriksaan prasarana lingkungan secara berkala di Kelurahan Kangkung.
2. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) beserta para aparat di Kelurahan Kangkung seharusnya mengadakan gotong royong secara rutin dengan masyarakat agar sampah di Kelurahan Kangkung dapat sedikit teratasi.
3. Untuk masyarakat, seharusnya lebih meningkatkan kesadaran dalam menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, S. 2010. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Dian. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Perumahan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Fuad, Anis dan Kandung Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Husni, H.S. 2010. *Evaluasi Pengendalian Sistem Informasi Penjualan*. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Rahardjo, Adisasmita. 2010. *Pembangunan Kota Optimum, Efisien, dan Mandiri*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono, A.G. 2016. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Suharno.2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publi: Kajian Proses, dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi (Contoh Aplikasi Evaluasi program Pengembangan SDM, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Teks)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- PERMEN Kementerian PUPR No. 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh

Skripsi/Jurnal

- Saputra, Ahmad Renaldi.2016. *Implementasi Program Neighborhood Upgrading Shelter and Project di Kota Bandarlampung*. Bandarlampung. Universitas Lampung
- Sari, Emi Marta.2016. *Implementasi Program Neighborhood Upgrading Shelter And Project Phase 2 (Kangkung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung
- Akbar, Muhammad Firyal.2016. *Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Menuju Utara)*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Gorontalo
- Nawawi, Muhammad Irfan. 2018. *Efektivitas Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Prasarana Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Di Kelurahan Terondol Kecamatan Serang Kota Serang*.Jurnal. Universitas Sultan Agung Tirtayasa

Syamsuddin._____.Evaluasi Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Palu (Studi Kasus Perda Nomor 21 Tahun 1998 *Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Praktik Tuna Susila dalam Wilayah Kotamadya Palu*). Jurnal. Universitas Tadulako